

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Relevansi Pemikiran Jacques Rancière dalam Politik di Indonesia**

Penulis menyadari bahwa gagasan kesetaraan demokrasi Rancière dapat menjadi suatu langkah yang baik untuk merenung kembali demokrasi Indonesia saat ini. Politik demokrasi Indonesia dewasa ini masih menyiratkan catatan-catatan minus. Fakta diskriminasi kaum lemah, perilaku rasis, praktik intoleran, dan penyingkiran terhadap mereka yang dianggap tidak ‘sama’ menunjukkan adanya ketidaksetaraan dalam tubuh demokrasi bangsa saat ini. Mereka adalah subjek terkategori dalam sistem demokrasi. Alhasil, gagasan multikulturalisme hanya sebatas wacana sebab di dalam demokrasi yang memang mengakui keberagaman, tetapi tetap mengklasifikasikan dalam wilayah yang terkotak-terkotak.<sup>1</sup>

Berdasarkan situasi problematis tersebut, penulis berusaha untuk membaca dan menganalisis secara kritis disposisi demokrasi di Indonesia yang pada umumnya masih belum mengakomodir secara menyeluruh keterlibatan masyarakat: ada yang masih tidak dihitung, tidak dianggap sebab selalu ada standar-standar yang digunakan sebagai ukuran kelayakan keterlibatan.

---

<sup>1</sup> MH Ihsani, "*Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia*", *Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 9 (September 2021), hlm. 308, diakses dari <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/1330>, pada 15 April 2023.

### 5.1.1 Politik Demokrasi sebagai Tatanan Sosial

Perkembangan demokrasi di Indonesia dibangun dari spirit demokrasi itu sendiri sebagaimana yang telah ditegaskan oleh Abraham Lincoln bahwa demokrasi adalah ‘pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat.’<sup>2</sup> Tesis ini mengafirmasi bahwa kedaulatan itu ada pada rakyat. Dalam upaya perelisasian kedaulatan rakyat tersebut, pemilu menjadi metode yang paling umum digunakan dalam masyarakat modern, termasuk di Indonesia untuk mewujudkan kedaulatan rakyat itu.

Akan tetapi, harus tetap ditegaskan bahwa demokrasi itu sendiri tidak identik dengan pemilu, karena pemilu hanya memungkinkan sebuah perwujudan demokrasi kedaulatan rakyat yang menjadikan keputusan-keputusan politik tentang masyarakat dan negara, yang dalam kenyataan hanya ditentukan oleh beberapa orang saja. Itulah ekspresi dari realisme demokrasi modern, bahwa rakyat tidak langsung membuat undang-undang seperti dikategorikan oleh Rousseau, melainkan melalui wakil-wakil yang mereka pilih. Artinya keputusan-keputusan penting politik hanya dilakukan oleh beberapa orang saja. Dengan demikian, dalam demokrasi kedaulatan rakyat ada unsur elitarisme, yaitu keputusan-keputusan politik tentang bagaimana masyarakat ditata, hanya dibuat oleh para elit politik.<sup>3</sup>

Dalam konteks ini, keterlibatan ‘*demos*’ dalam politik demokrasi pun hanya pemenuhan terjadinya kekuasaan. Seperti yang ditegaskan oleh Budiarto Danujaya dalam ‘*Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradokks*’ (2012) bahwa politik demokrasi

---

<sup>2</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 453.

<sup>3</sup> Norbertus Jegalus, *Diktat Mata Kuliah Filsafat Nusantara*, (Kupang: Fakultas Filsafat UNWIRA-Kupang, 2018), hlm. 43.

hanya akan bertumpu pada pengupayaan berkelanjutan untuk mencapai kesepakatan aktual dengan cara memaksimalkan jumlah individu yang menyetujui tindakan atau kebijakan yang akan ditempuh.<sup>4</sup> Dalam konteks ini, kelompok superior tetap memiliki peran penting dalam memerintah dan mengatasi keberadaan kelompok masyarakat inferior yang dalam kerangka pemikiran Rancière disebut sebagai *demos*. Inilah logika dari sebuah politik demokrasi yang dalam kerangka Rancèrian dipahami sebagai tatanan sosial, di mana yang eksis adalah superior dan inferior, antara yang punya kuasa dan tidak. Logika demokrasi Indonesia demikian memainkan distribusi akal budi: ada pembagian-pembagian kelas sosial. Ini adalah wajah dari demokrasi konsensus. Demokrasi sebagai politik konsensus dipahami sebagai kesepakatan penjamin hak asasi setiap individu, termasuk mereka yang terpinggirkan, yang namun pada akhirnya menciptakan kondisi ketidaksetaraan karena peminggiran-peminggiran kepentingan kelompok minoritas demi keputusan mayoritas.<sup>5</sup>

Dalam kerangka tatanan sosial ini, politik demokrasi Indonesia dapat dirumuskan dengan tiga paradigma politik yang diasumsikan oleh Rancière sebagai wujud dari adanya praktik distribusi indrawi yang mendudukan kesetaraan sebagai tujuan, yaitu *Arkhé* politik sebagai prinsip utama penopang tatanan masyarakat, kesetaraan hanya sebagai tiruan, dan kesetaraan sebagai tujuan akhir.

---

<sup>4</sup> Budiarto Danujaya, *Demokrasi Disensus: Politik dalam Paradoks*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012), hlm. xix.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 34.

### 5.1.1.1 *Arkhé* dalam Tatahan Sosial

Situasi politik demokrasi Indonesia diperhadapkan pada dinamika antara masyarakat mayoritas dan minoritas. Daftar historis menjelaskan bahwa perjuangan hak-hak konstitusional kelompok minoritas sudah di mulai dari zaman sistem pemerintahan Orde Baru, tetapi hingga kini posisi minoritas masih sebuah pertanyaan. Bahwasannya pemegang otoritas publik atau kekuasaan masih direpresentasikan kelompok mayoritas, atau dalam demokrasi elektoral dinisbahkan kepada mereka yang menang dalam pemilihan umum sehingga mendapatkan distribusi kekuasaan.<sup>6</sup> Kondisi ini yang disebut oleh Muhamad Nur Prabowo Setyabudi sebagai suatu bentuk tendensi mayorokrasi dalam bernegara.<sup>7</sup>

Tendensi mayorokrasi ini akan meletakkan standar-standar dan hukum yang kemudian ditetapkan secara konstitusional dalam tatahan sosial sehingga dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk mereka yang minoritas dan tidak terhitung. Sebab di sana ada dinamika kepatuhan untuk menjalankan aturan yang telah ditetapkan oleh pemegang kekuasaan. Kepatuhan ini merupakan bentuk dari *arkhe*-politik baru. Dalam artian bahwa politik demokrasi dikonstruksikan dengan logika *arkhe*-politik. Tatahan masyarakat dilihat sebagai hierarkis yang berdasarkan *arkhê*. Rancière menerjemahkan *arkhê* ini sebagai permulaan dan perintah, sebuah prinsip dasar yang ditegaskan kembali bahwa tatahan masyarakat diatur dengan cara demikian. Tatahan sosial atas dasar *arkhê* menegaskan kelayakan memerintah dan dihitung menjadi bagian

---

<sup>6</sup> Endang Turmudi, *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), hlm. 6.

<sup>7</sup> *Ibid.*

dalam tatanan sosial berdasarkan faktor kekayaan, keturunan, bakat, penguasaan pengetahuan, dan kekayaan.<sup>8</sup>

Fenomena mayorokrasi, fundamentalisme agama, sentimentalisme dan politik identitas yang terus eksis dalam politik demokrasi Indonesia merupakan wujud dari suatu logika politik yang berbasiskan *arkhê*. Artinya, euforia demokrasi Indonesia dililit oleh *arkhê* agama, *arkhê* etnis, dan *arkhê* mayoritas. Akibatnya yang terjadi, seperti yang dinyatakan oleh Rancière, adalah pertama, pola psikologisasi yaitu status penerimaan terhadap ide hierarki sosial berdasarkan kualitas alamiah dan yang menguasai pengetahuan. Kedua, pola sosiologisasi yaitu pembagian masyarakat berdasarkan unsur alamiah (misalnya orang tua memimpin anak, majikan memimpin budak, yang kuat memimpin yang lemah) dan penguasaan pengetahuan.<sup>9</sup>

Prinsip *arkhê* ini kemudian diterima seluruh bagian masyarakat sebagai prinsip yang dapat membawa kehidupan bersama dapat berjalan. Dalam artian negatif, penanaman prinsip *arkhê* dalam tatanan sosial merupakan suatu upaya menolak segala bentuk subjektivasi atau kemunculan orang-orang yang dianggap bukan bagian dari tatanan sosial. orang-orang yang dianggap keberadaannya adalah sebuah kesalahan dan membahayakan harmoni kekuasaan atas dasar *arkhê*. Tatanan sosial akan tertutup pada munculnya alternatif baru penemuan kesetaraan bagi siapa saja.

---

<sup>8</sup> Sri Indiyastutik, *Dissensus: Demokrasi Sebagai Perselisihan Menurut Jacques Rancière, Op. Cit.*, hlm. 177.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 178.

### 5.1.1.2 *Para-Politics*: Kesetaraan Hanya Tiruan

Kritik Rancière bahwa dalam konteks tatanan sosial ada kebijakan yang dibuat untuk memberi ruang setara bagi ‘*demos*’ maupun yang dominan untuk bersaing dalam merebut kesempatan menduduki kekuasaan atau memimpin. Keduanya terlibat dalam ruang yang disediakan secara formal oleh hukum tatanan sosial, tetapi sebenarnya itu hanya formalitas sebab pada praktiknya persaingan antara yang dominan dan ‘*demos*’ itu tidak terjadi. Keduanya sebenarnya tetap berada di tempatnya masing-masing. ‘*The wrong*’ adalah kelompok yang sibuk dengan pekerjaan sehari-hari untuk kebutuhan hidup sehingga tidak ada waktu untuk terlibat dalam arena ‘politik.’<sup>10</sup> Sementara itu, kelompok-kelompok dominan yang memiliki sumber daya, waktu, dan berada di pusat-pusat kota tempat terjadinya arena perebutan kekuasaan. Dengan demikian, hanya kelompok dominanlah yang memiliki kesempatan menduduki kekuasaan. Dengan kata lain, ide kehidupan bersama yang memberi ruang yang setara bagi yang dominan maupun ‘*demos*’ hanyalah bentuk tatanan masyarakat tiruan yang seolah-olah mengakomodasi kesetaraan.

Dalam konteks politik demokrasi Indonesia, contoh logika *para-politics* ini dapat dikontekskan dengan realitas pemilu. Pemilu secara sosiologis adalah konstruksi pemilik kekuasaan yang hanya mengakomodir keterlibatan ‘*demos*’ dalam upaya kebaikan bersama, tetapi sebenarnya eksistensi ‘*demos*’ tetap akan selalu diperintah. Dalam pelaksanaannya, pemilu seringkali dimanipulasi dengan berbagai peraturan yang

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 180.

tidak demokratis oleh yang dominan.<sup>11</sup> Akibatnya, pemilu hanya sekedar realitas formal yang mengikutsertakan ‘*demos*’ dalam urusan konstestasi politik. Sebab setelah ia terlibat, aktualitas dirinya selalu sebagai kaum inferior yang dipimpin oleh kaum superior. Di lain pihak, tentu akan ada individu yang memiliki kedaulatan penuh dan ada warga negara. di antara keduanya akan ada kesenjangan karena tidak semua individu sekaligus warga negara. Selalu ada individu-individu yang luput dihitung sebagai warga negara. Dengan demikian, kesetaraan yang digagas sebagai basis tatanan sosial hanya sebuah tiruan.

### **5.1.2 Demonstrasi: Bentuk Subjektivasi Politik**

Penulis mencoba mengangkat contoh aktual dalam politik demokrasi Indonesia untuk mengafirmasi dan mengintegrasikan gagasan Rancière tentang subjektivasi politik sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Demonstrasi dalam konteks ini hanya untuk menjelaskan tentang proses subjektivasi politik. Contoh demonstrasi menolak rasisme yang dilakukan oleh mahasiswa dan pelajar Papua Jember di Bundaran DPRD Jember, Jawa Timur pada Rabu 28 Agustus 2019. Unjuk rasa ini sebagai reaksi terhadap peristiwa rasisme yang dialami oleh mahasiswa Papua di Kota Surabaya dan Kota Malang.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Sri Yunuarti, dkk., *Adaptasi Sistem Pemilu Paralel Bagi Indonesia*, (Surabaya: Airlangga University Press, 2020), hlm. 22.

<sup>12</sup> Andi Jauhary, *Tolak Rasisme, Mahasiswa-Pelajar Papua Demonstrasi di Jember*, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1034554/tolak-rasisme-mahasiswa-pelajar-papua-demonstrasi-di-jember>, pada 18 April 2023, pukul 10.15 am. [Dinamika demonstrasi dalam konteks ini tidak dimaksudkan oleh penulis bahwa semua jenis bentuk demonstrasi. Demonstrasi dalam hal ini lebih berfokus pada upaya-upaya klaim kesetaraan yang sering tidak diindahkan dalam tatanan sosial.].

Ekspresi demonstrasi ini sebenarnya merupakan logika dari rasionalitas ketidaksepakatan terhadap perlakuan golongan mayoritas terhadap minoritas. Eksistensi kaum minoritas Papua di Jawa memang diakui secara formal yuridis, tetapi secara praktis-moral keberadaan mereka tidak dianggap. Mereka adalah ‘yang salah atau *demos*’ yang tidak dianggap dan tidak dihitung dalam tatanan sosial dominan sebab mereka tidak memiliki dan memenuhi kualifikasi-kualifikasi yang diletakkan sebagai *arkhe*, seperti kualitas fisik (kulit terang, berambut lurus), kekayaan, kepintaran, dan kekuasaan.

Tetapi mereka (mahasiswa Papua) ‘yang salah’<sup>13</sup> tersebut kemudian mengandaikan kesetaraan sebagai titik tolak cara berpikir agar dapat memunculkan diri dalam tatanan sosial melalui akses demonstrasi agar eksistensi mereka kemudian itu diakui sebagai subjek politik. Artinya, perilaku unjuk rasa tersebut merupakan ekspresi dari bentuk subjektivasi politik dari mahasiswa Papua yang disebut sebagai ‘*demos*’, yang memiliki paradigma presuposisi bahwa ‘ia setara’, tampil dalam tatanan sosial dominan untuk menjadi bagian dalam bagian tatanan tersebut. Mereka muncul dalam tatanan sosial dominan untuk melawan dan meniadakan realitas distribusi akal budi, yakni tindakan pembagian dalam tatanan sosial berdasarkan standar-standar yang

---

<sup>13</sup> E.N Sari & S. Samsuri, "*Etnosentrisme dan sikap intoleran pendatang terhadap orang Papua*", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu*, Vol. 22, No. 01, (Juni 2020), hlm. 145, diakses dari <http://jurnalanthropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/191>, pada 16 April 2023. [Kelompok mahasiswa Papua di sini dipahami oleh penulis sebagai ‘Yang Salah’, tetapi tidak boleh dipahami bahwa ‘yang salah’ merujuk pada identitas kelompok masyarakat tertentu. Penempatan mahasiswa Papua di sini adalah cara untuk menegaskan bahwa ‘yang salah’ ada sebagai bagian dari masyarakat].



ditentukan oleh tatanan sosial. Tindakan unjuk rasa mahasiswa Papua ini adalah tindakan politik yang membawa daya transformasi tatanan sosial. Samuel A. Chambers menyebutkan bahwa politik Rancière adalah politik dari tatanan sosial. Artinya, perubahan yang dihasilkan oleh subjektivasi subjek ‘mahasiswa Papua’ adalah transformasi. Dalam konteks ini, hendak ditegaskan bahwa politik dalam kerangka Rancièrean bukanlah sebuah revolusi yang meniadakan atau menghancurkan tatanan sosial.

Contoh lain, gerakan penolakan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua (UU Otsus). Gerakan ini pada umumnya dilakukan oleh mahasiswa dan pengiat sosial yang menolak adanya UU Otsus dengan tesis bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat hanya memikirkan kepentingan pemerintah, dan tentu saja masyarakat Papua akan hidup di bawah asas perintah kekuasaan.<sup>14</sup> Dalam konteks ini, gerakan penolakan UU Otsus adalah sebagai bentuk politik yang diprakarsai pada kesadaran kesetaraan yang diandaikan oleh ‘yang salah’. Mereka tampil untuk menggoyahkan kepakaran dan realitas dominasi elit dalam membuat kebijakan.

Dalam wawancara Mikkel Bolt dengan Rancière perihal ‘*Hatred of Democracy*’, ditegaskan Rancière bahwa yang paling penting dalam sebuah politik, misalnya sebuah demonstrasi, adalah bukan pada perubahan kebijakan yang dihasilkan, tetapi bagaimana ‘*demos*’ menjadi terlihat.<sup>15</sup> Artinya, urgensi dari sebuah demonstrasi sebagai bentuk pemunculan ‘*demos*’ tidak berkuat pada persoalan kebijakan. Tetapi

---

<sup>14</sup> Syamsudin Haris (ed.), *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), hlm. 532.

<sup>15</sup> Peter Hallward, *Staging Equality: Rancière’s Theatrocracy and the Limits of Anarchic Equality*, *Op. Cit.*, hlm. 178.

lebih kepada suatu pengakuan terhadap eksistensi ‘*demos*’ sebagai bagian dari bagian tatanan sehingga perlakuan terhadapnya pun harus setara.

## 5.2 Catatan Kritis

Setelah menguraikan gagasan politik kesetaraan demokrasi, menurut penulis ada beberapa hal yang perlu dilihat dan dikritisi dari konsep Rancière tersebut, antara lain: *Pertama, Tidak ada deskripsi bagaimana memperlakukan mereka yang melakukan tindakan verifikasi kesetaraan.* Dimensi radikalitas politik sangat berpengaruh bagi Rancière dalam tata kelola gagasan politik demokrasi sebagai politik radikal, yakni politik dari ‘bawah’: dari mereka atau masyarakat yang tidak diperhitungkan dalam tatanan sosial. Dalam politik demokrasi itu, kesetaraan itu diandaikan oleh setiap orang dan semua orang. Mereka (*demos, the wrong*) harus menempatkan kesetaraan sebagai aksioma yang didukung dengan kualitas kehendak. Mirisnya, Rancière di sini tidak sedikit pun menyentuh penjelasan tentang bagaimana memperlakukan mereka (*demos, the wrong*) yang terlibat dalam politik demokrasi. Artinya, disposisi tatanan sosial dipertanyakan: apa yang harus dilakukan dari sisi tatanan sosial? Benar bahwa Rancière menjelaskan kesetaraan sebagai aksioma juga ada pada tatanan sosial yang ditunjukkan dengan logika pembagian berdasarkan prinsip kesetaraan distributif. Tetapi menurut penulis, Rancière tidak menjelaskan apa dan bagaimana yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan mereka yang tampil dalam ruang tatanan sosial. Demikian, perlu diperluas pemahaman konsep Rancière tentang kesetaraan sebagai aksioma ini. Di hadapan mereka yang melakukan verifikasi kesetaraan, tatanan sosial dominan (kaum elit, dan lain-lain) juga mengandaikan kesetaraan. Tatanan sosial dominan pun harus

menempatkan diri bahwa mereka bukan superior. Sehingga, ada ruang intersubjektivitas dan komunikatif antara '*demos*' dan tatanan sosial dominan.

*Kedua, Tafsiran anarkisme terhadap gagasan politik disensus.* Catatan kritis ini datang dari Todd May, sebagai salah satu pendukung pemikiran Rancière. Menurutnya, gagasan politik demokrasi disensus Rancière ini memiliki peluang untuk menciptakan tafsiran anarkis-radikal. Dua peristiwa demonstrasi di Prancis yang digunakan oleh Rancière untuk menjelaskan konsepnya dapat menimbulkan kesalahan tafsiran yang kemudian akan menegaskan bahwa jalan demonstrasi adalah satu-satunya cara untuk mencapai kesetaraan. Ekstremnya lagi apabila demonstrasi dilihat secara anarkis: penolakan, pertentangan, perselisihan, kekerasan, bahkan berujung pembantaian manusia adalah cara untuk menegakan kesetaraan bagi setiap orang dan semua orang.

Dalam konteks ini, Todd May ingin memperluas gagasan Rancière ini dengan perlunya menempatkan spirit anti-kekerasan dalam melakukan tindakan politik. Upaya penolakan, pertentangan dan perselisihan terhadap ketidaksetaraan harus dilandasi oleh prinsi anti-kekerasan ini. Tetapi perlu diperhatikan bahwa prinsip anti-kekerasan bukan berarti adanya logika afirmatif yang didukung dengan membangun sikap dialog seperti halnya dalam demokrasi konsensus, melainkan bagaimana pertentangan antara '*the wrong*' dan tatanan sosial dominan dilakukan dalam semangat anti-kekerasan. Juga diperhatikan bahwa tindakan politik yang anti-kekerasan ini bukan berarti menempatkan mereka, yaitu para penguji kesetaraan, sebagai subjek yang pasif. Tindakan anti-kekerasan ini memerlukan kreativitas yang lebih dibandingkan dengan kekerasan.

Seperti kata Todd May, bahwa: “untuk menangkal tanpa persenjataan bagi mereka yang memilikinya, memerlukan perenungan yang lebih besar tentang sumber daya dan taktik”.<sup>16</sup>

*Ketiga, kemungkinan hilangnya kepercayaan terhadap negara.* Sebagaimana diketahui bahwa pada umumnya sistem demokrasi yang diterapkan dalam sebuah bangsa adalah demokrasi presidensial. Demokrasi presidensial diyakini dapat mengakomodir semua kepentingan rakyat. Wujud dari demokrasi presensial adalah adanya negara. Negara terbentuk untuk mewadahi kepentingan rakyat melalui perwakilan-perwakilan. Eksistensi negara diakui dan diyakini bahwa dapat menjamin kesetaraan bagi semua orang.

Dalam konteks negara, penulis menyadari bahwa kesulitan dalam memahami pemikiran Rancière ini dapat mereduksi paradigma tentang negara. Tema filosofis Rancière tentang tatanan sosial dominan tentu memiliki resonansi dengan negara. Negara akan seolah-olah ditempatkan sebagai tatanan sosial dominan. Artinya, dalam konteks politik demokrasi Rancièrean, keberadaan negara akan dilihat sebagai suatu ancaman. Sebab, negara akan selalu dilihat sebagai sebuah kekuatan dan kekuasaan elit yang harus dihadapi, dikontrol, atau ditumbangkan oleh gerakan revolusi atau gerakan rakyat guna memperkecil atau menyingkirkan kekuatannya. Dalam konteks Indonesia yang menerapkan demokrasi parlementer, eksistensi demokrasi parlementer itu akan dilihat sebagai bentuk negara dengan mengatasnamakan kedaulatan rakyat. Rezim parlemen ini dianggap lebih berbahaya dari pada monarki karena

---

<sup>16</sup> Todd May, *The Political Thought of Jacques Rancière: Creating Equality*, (Edinburgh: Edinburgh University Press, 2008), hlm. 23.

pengatasnamaan kedaulatan rakyat dan menyembunyikan tujuan kekuasaan dari segilintir orang.

Model politik demokrasi radikal Rancièrian ini menempatkan negara secara berjarak (*put the State as a distance*). Menurut penulis, model politik demokrasi Rancièrian akan berbahaya bagi pengakuan terhadap eksistensi negara, sebab model politik ini cenderung untuk menemukan dirinya sendiri, tidak terlembagakan, dan selalu berjalan di luar proses parlemen.

### **5.3 Kesimpulan**

Dari penelusuran gagasan kesetaraan demokrasi Rancièrie ini, penulis akan menguraikan beberapa kesimpulan yang secara komprehensif merangkum seluruh telaah filosofis atas pemikiran Rancièrie tersebut. *Pertama*, Tatanan politik demokrasi yang selalu mewedahi gagasan dan praktik untuk mengangkat kesetaraan pada setiap orang, menemui jalan buntu akibat terjebak dalam logika dan persepsi distribusi indrawi yang memandang tata kehidupan masyarakat terbagi-bagi dalam hierarki. Dasar pembagian ini adalah sebuah *arkhê*, yaitu standar kualifikasi kelayakan untuk menjadi bagian dari tatanan sosial (termasuk kelayakan memimpin), yang merujuk pada kepemilikan kodrat alamiah (bakat dan keturunan), kepakaran, kenengratan, kekayaan, dan kekuasaan. Gagasan ini bukanlah politik, sebab realitas yang terjadi adalah perkara bagi-membagi dalam tatanan sosial. Selain itu, kesetaraan yang diwacanakan dalam tatanan politik demokrasi hanya bersifat tiruan dan diletakkan sebagai tujuan akhir. Sehingga, realitas itu akan tetap kembali pada dinamika dari logika distribusi indrawi. Mirisnya, demi sebuah keharmonisan tatanan sosial, gerakan politik yang selalu berupa

perselisihan antara logika kesetaraan akal budi bagi siapa saja dan logika membagi-bagi tempat dan fungsi masyarakat, diredam dan disembunyikan kemungkinan perwujudannya. Sehingga bagi Rancière, hal ini bukanlah tindakan politik, melainkan sebagai tindakan *'the police'*.

*Kedua*, Berhadapan dengan dinamika distribusi indrawi tersebut ada tiga hal yang dapat dilakukan untuk terciptanya realitas kesetaraan dalam tatanan sosial demokrasi, yakni:

1. Kesetaraan ditempatkan sebagai pengandaian (presuposisi), yaitu sesuatu yang harus diandaikan diawal. Kesetaraan sebagai titik awal yang menjadi asumsi dasar dari sebuah tindakan. Kesetaraan tidak ditempatkan sebagai tujuan filosofis atau tujuan politik. Kesetaraan tidak menjadi dasar ontologis dari struktur hubungan manusia yang harus dikejar sebagai tujuan. Kesetaraan itu diandaikan dari awal bahwa kesetaraan itu ada pada setiap orang dan semua orang.
2. Kesetaraan sebagai titik tolak cara berpikir. Kesetaraan pada prinsip bahwa semua orang memiliki kualitas akal budi yang sama. Semua orang menyadari bahwa kemampuan akal budinya sama dengan orang-orang lain. Dengan demikian, tindakan politik itu dilakukan oleh orang-orang yang mengalami emansipasi. Orang-orang yang mengalami emansipasi ini bisa siapa saja yang dianggap oleh tatanan sosioo dominan sebagai *'the wrong'*.
3. Kesetaraan itu diverifikasi. Kesetaraan yang telah diandaikan itu kemudian diverifikasi melalui proses subjektivasi politik, yakni proses pemunculan subjek

‘yang salah’ dalam tatanan sosial sehingga mentransformasikan tatanan sosial. Tetapi harus diketahui bahwa kesetaraan ini bersifat kontingen, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Sekalipun demikian, proses subjektivasi selalu berkarakter argumentatif, teatral, dan heterologis.

*Ketiga*, Politik demokrasi selalu berupa perselisihan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak dihitung sebagai bagian dalam tatanan sosial terhadap logika membagi-bagi berdasarkan kegunaan, tempat, kepakaran, bakat, kekayaan, kepercayaan, dan kekuasaan. Politik demokrasi ini dilakukan oleh orang-orang yang menempatkan akal budinya setara dengan siapa saja untuk mengusik tatanan sosial dominan yang menyingkirkan mereka ‘yang salah’ sebagai bagian yang tidak punya bagian. Dan politik demokrasi itu terjadi jika ada orang atau orang-orang yang merawat kehendaknya untuk menemukan kesetaraan tanpa bergantung atau menunggu diberikan oleh tatanan sosial. Demokrasi itu selalu bersifat disensus, ada perselisihan tetapi bukan kekerasan. Artinya, mereka (bagian yang tak memiliki bagian) hadir kembali dengan maksud untuk dapat mematahkan rezim kekuasaan para penguasa dari praktik-praktik politik yang salah. Mereka kembali merebut kesetaraan yang dituntutnya sebagai akibat dari kondisi ketidaksetaraan yang selama terjadi. Melalui politik demokrasi disensus, subjek melakukan penentangan terhadap sistem tatanan untuk merebut kembali peran serta posisinya dalam masyarakat. Tetapi harus diketahui bahwa politik demokrasi disensus yang didasarkan pada logika kesetaraan hanya bersifat kontingen, yakni tidak selalu terjadi, bisa terjadi kapan saja dan di mana saja.

Gagasan kesetaraan demokrasi Rancière dikategorikan oleh para pembacanya sebagai post-anarkis. Pemikirannya memang sulit untuk dipahami, tetapi juga sangat relevan untuk dibumikan dalam pelbagai diskursus politik demokrasi dewasa ini, terutama bagi bangsa Indonesia, yang secara sistem pemerintahan menerapkan demokrasi. Pemikiran Rancière ini dapat membantu untuk membaca realitas perpolitikan di Indonesia yang cenderung mengeksklusifkan keberadaan orang-orang yang tidak memiliki kualifikasi-kualifikasi yang ditentukan secara umum dalam tatanan sosial.



## DAFTAR PUSTAKA

### SUMBER PRIMER:

Danujaya, Budiarto., *Demokrasi Disensus: Politik Dalam Paradoks*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2012.

Indiyastutik, Sri., *Disensus: Demokrasi Sebagai Perselisihan*, Jakarta: Buku Kompas, 2019.

Nugroho, R. Ari., *Ranciere dan Subjek Politik '65*, Yogyakarta: Jejak Pustaka, 2021.

Rancière, Jacques., *Disagreement: Politics and Philosophy*, dalam Julie Rose (terj.), Minneapolis: University Of Minnesota Press, 1999.

Ranciere, Jacques., *Dissensus: On Politics and Aesthetics*, dalam Steven Corcoran (terj.), London: Continuum International Publishing Group, 2010.

### SUMBER SEKUNDER:

Bowman, Paul & Stamp, Richard (ed.), *Critical Dissensus: Reading Ranciere*, London: Continuum International Publishing Group, 2011.

Damsar, *Pengantar Teori Sosiologi*, Jakarta: Kencana, 2015.

Davis, Oliver., *Key Contemporary Thinkers: Jacques Rancière*, Cambridge: Polity Press, 2010.

Deranty, Jean-Philippe (ed.), *Jacques Ranciere: Key Concepts*, United Kingdom: Acumen Publishing Ltd., 2010.

Tanke, Joseph J., *Jacques Rancière: An Introduction Philosophy, Politics, Aesthetics*, Bloomsbury Academic: New York, 2011.

May, Todd., *The Political Thought of Jacques Ranciere: Creating Equality*, Edinburgh University Press Ltd., 2008.

Rancière, Jacques., *The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible*, dalam Gabriel Rockhill (terj.), London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004.

Ranciere, Jacques., *The Ignorant Schoolmaster: Five Lessons in Intellectual Emancipation*, dalam Kristin Ross (terj.), Stanford: Stanford University Press, 1991.

Ranciere, Jacques., *The Politics of Aesthetics: The Distribution of the Sensible*, dalam Gabriel Rockhill (ed.), London: Bloomsbury Publishing Plc, 2004.

Ranciere, Jacques., *Moments Politiques*, dalam Mary Foster (terj.), New York: Seven Stories Press, 2014.

Rancière, Jacques., *Althusser's Lesson*, dalam Emiliano Battista (transltd.), New York: Continuum International Publishing Group, 2011.

Rancière, Jacques., *Politics of Perception*, dalam Gabriel Rockhill (transltd.), London & New York: Continuum, 2004.

Rockhill, Gabriel & Watts, Philip (ed.), *Jacques Rancière: History, Politics, Aesthetics*, London: Duke University Press, 2009.

Robson, Robert Mark (ed.), *Jacques Ranciere: Aesthetics, Politics, Philosophy*, Edinburgh: Edinburgh University Press, 2019.

## **SUMBER TERSIER:**

Adian, Donny G., *Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkrutan Liberalisme*, Depok: Koekoesan, 2010.

Bertens, K., *Sejarah Filsafat Yunani (Edisi Revisi 2018)*, Yogyakarta: Kanisius, 2018.

Budiardjo, Miriam, dkk., *Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991.

Bourdieu, Pierre., *In Other Words, Essays Towards a Reflexive Sociology*, Cambridge: Polity Press, 1990.

Evren, Rousselle & Evren, Sureyya (ed.), *Post-Anarchism: A Reader*, London: Pluto Press, 2011.

Fuady, Munir., *Konsep Negara Demokrasi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.

Gahril, Donny., *Demokrasi Substansial: Risalah Kebangkrutan Liberalisme*, Depok: Koekoesan, 2010.

House, Jim & MacMaster, Neil., *Paris 1961: Algerians, State Terror, and Memory*, Oxford: Oxford University Press, 2006.

Haris, Syamsudin (ed.), *Menimbang Demokrasi Dua Dekade Reformasi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019),

Kambo, Gustiana., *Politik Identitas Etnik: Sebuah Kajian Konstruktivis dalam Tradisi Interaksi Simbolik*, Makasar: Unhas Press, 2010.

Liliweri, Alo., *Prasangka, Konflik, dan Komunikasi Antarbudaya*, Jakarta: Kencana, 2018.

Latif, Yudi., *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2015.

Magnis-Suseno, Franz., *Dari Mao ke Marcue: Percikan Filsafat Marxis Pasca-Lenin*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2013.

Mali, Mateus (ed.), *Perjumpaan Pancasila dan Kristianitas: Reposisi Relasi Negara dan Agama Masyarakat Plural*, Yogyakarta: Lamahera, 2009.

Matijasevich, David ., *Radical Democracy and Its Limits*, New York: Springer International Publishing, 2019.

Naylor, Phillip C., *Historical Dictionary of Algeria*, Washington: Rowman & Littlefield Publishers, 2015.

Pureklolon, Thomas T., *Demokrasi dan Politik: Menelisik Dinamika Kekuasaan, Sosial, Budaya, dan Pancasila*, Malang: Intrans Publishing, 2019.

Suryajaya, Martin., *Sejarah Pemikiran Politik Klasik: Dari Prasejarah Hingga Abad Ke-4 M*, Tangerang: CV. Marjin Kiri, 2016.

Suryajaya, Martin., *Imanensi dan Transendensi: Sebuah Rekonstruksi Deleuzian Atas Ontologi Imanensi Dalam Tradisi Filsafat Prancis Kontemporer*, Jakarta: Aksi Sepihak, 2009.

Turmudi, Endang., *Merajut Harmoni, Membangun Bangsa: Memahami Konflik dalam Masyarakat Indonesia*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.

Wibowo, A. Setyo., *Paidea: Filsafat Pendidikan-Politik Platon*, Yogyakarta: Kanisius, 2017.

Yunuarti, Sri, dkk., *Adaptasi Sistem Pemilu Paralel Bagi Indonesia*, Surabaya: Airlangga University Press, 2020.

## **JURNAL DAN MANUSKRIP**

E.N Sari & S. Samsuri, "*Etnosentrisme dan sikap intoleran pendatang terhadap orang Papua*", *Jurnal Antropologi: Isu-Isu*, Vol. 22, No. 01, (Juni 2020): 102-109, diakses dari <http://jurnalantropologi.fisip.unand.ac.id/index.php/jantro/article/view/191>, pada 16 April 2023.

Ihsani, MH., "*Diskriminasi dalam Kehidupan Beragama di Indonesia*", *Sosial: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial*, Vol. 1, No. 9 (September 2021):154-161, diakses dari <https://journal.actual-insight.com/index.php/konstruksi-sosial/article/view/1330>, pada 15 April 2023.

Farihah, Irzum., *Filsafat Materialisme Karl Marx: Epistemologi Dialectical and Historical Materialism*, *Jurnal Ilmu Aqidah dan Studi Keagamaan*, Vol. 3, No. 2 (Desember, 2015): 132-139.

Jegalus, Norbertus., *Diktat Mata Kuliah Filsafat Nusantara*, Kupang: Fakultas Filsafat UNWIRA-Kupang , 2018.

Makki, Majid., *Ranciere Account of Identity Politics: Philosophical Techniques of Existinguishing Political Subjectivity*, *Ethical Perspectives* 21, No. 3 (2014): 401-428.

Myers, Ella., *"Presupposing Equality: The trouble with Rancière's Axiomatic Approach"*, *Jurnal of Philosophy & Social Criticism (Online)*, (Oktober 2014): 345-350, diakses dari <https://doi.org/10.1177/0191453714554027>, pada 28 Maret 2023.

Rancière, Jacques., *The Cause of Other*, Parallax, Vol. 4, No. 2 (1998).

Romadona, Muhamad Taufik ., *Louis Althusser dan Filsafat Sebagai Yang Politis*, *Jurnal Aqidah dan Filsafat Islam*, Vol. 5, No.2, (2020): 197-236.

Sari, Ervita., *Konsep Ideologi dan Aparatur Negara dalam Novel Tanah Surga Merah Karya Arafat Nur: Kajian Sosiologi Louis Althusser*, *Jurnal BAPALA*, Vol.5, No. 2 (2018): 354-369.

Rancière, Jacques., *Politics, Identivication, and Subjectivization, October*, Vol. 61, The Identity in Questions, (Summer, 1992).

#### **INTERNET:**

*Jacques Ranciere: Professor of Philosophy at The European Graduate School*, diakses dari <https://egs.edu/biography/jacques-ranciere/>, pada tanggal 3 Oktober 2022 pukul 10:00 am.

Jauhary, Andi., *Tolak Rasisme, Mahasiswa-Pelajar Papua Demonstrasi di Jember*, diakses dari <https://www.antaraneews.com/berita/1034554/tolak-rasisme-mahasiswa-pelajar-papua-demonstrasi-di-jember>, pada 18 April 2023.